



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 4 AGUSTUS 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



KENYA RAZIA: Salah satu toko miras Sobat Miras yang diidat oleh DPRD mendongk pembatasan gerai lewat perda.

DPRD Gagas Perda Khusus Atur Zonasi Toko Miras

SIDOARJO - Polemik mengenai gerai minuman keras (miras) di Kota Delta mendapat perhatian DPRD. Regulasi yang selama ini menjadi dasar pengendalian peredaran miras dinilai masih memiliki kelemahan sehingga perlu dievaluasi. Bahkan, aturan tersebut berpeluang dipisahkan menjadi peraturan daerah (perda) khusus.

Saat ini, pengendalian peredaran miras di Sidoarjo masih mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantib). Aturan itu juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, ada opsi memisahkan pengaturan peredaran miras dari Perda Trantib agar pembahasannya lebih komprehensif dan fokus. "Kami matangkan terlebih dahulu apakah memungkinkan dipisah menjadi perda tersendiri atau memang cukup dilakukan revisi," katanya kemarin (3/8).

Menurut Nasih, perda yang berlaku saat ini lebih banyak mengatur larangan bagi penjual maupun pelaku usaha. Sementara itu, pengaturan mengenai perlindungan masyarakat dari dampak peredaran dan konsumsi miras dinilai masih belum memadai. Salah satu ketentuan yang dinilai perlu diperjelas ada-

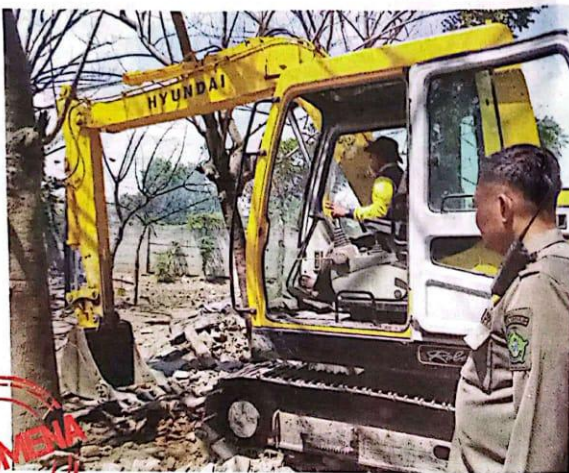
lah aturan zonasi gerai miras. Perda memang melarang penjualan minuman beralkohol di sekitar sekolah dan tempat ibadah. Namun, hingga kini belum ada ketentuan yang mengatur batas atau radius yang dimaksud dengan lokasi berdekatan. Akibatnya, aturan tersebut masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. (ful/hen)

Lokalisasi Krengseng Krian Dibongkar

■ Satpol PP Ratakan 21 Warung dan 12 Bilik

KRIAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik prostitusi. Setelah menertibkan lokalisasi Randu Pitu di belakang Pasar Larangan, Kecamatan Candi, kini giliran lokalisasi Krengseng di Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, yang dibongkar hingga rata dengan tanah. Senin (3/8).

Sebanyak 21 warung remang-remang dan 12 bilik prostitusi dibongkar dalam operasi gabungan yang melibatkan ratusan personel Satpol PP Sidoarjo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Krian, Polsek Krian, Koramil Krian, Dinas PU Bina Marga, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dengan menggunakan alat berat jenis ekskava-



TEGAS: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo membongkar bangunan di kawasan lokalisasi Krengseng, Kecamatan Krian, menggunakan alat berat, Senin (3/8).

FENOMENA

ban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Raden Novianto Koesno Adi Putro, mengatakan pembongkaran dilakukan setelah

terdiri atas 21 warung remang-remang dan 12 bilik prostitusi. "Ada sekitar 21 warung yang kami bongkar. Untuk bilik, di sisi utara terdapat sekitar empat bilik, sedangkan di sisi selatan sekitar tujuh hinc-

gas tersebut dilakukan sebagai upaya menekan praktik prostitusi yang dinilai berpotensi meningkatkan penyebaran HIV/AIDS serta memicu peredaran minuman keras (miras) ilegal. "Tentunya ini merupa-

Bupati Akan Tertibkan Sound Horeg yang Ganggu Warga

■ Di Perayaan HUT RI

KOTA-Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Sidoarjo Subandi mengingatkan masyarakat agar perayaan 17 Agustus tidak dijadikan ajang yang mengganggu ketertiban umum. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo siap menertibkan kegiatan sound horeg apabila terbukti meresahkan warga, terlebih jika disertai penyalahgunaan minuman keras.

Menurut Subandi, hiburan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan sah saja digelar, namun harus tetap mengedepankan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Ia menilai penggunaan sound horeg dengan volume berlebihan tidak hanya menimbulkan kebisingan, tetapi juga kerap dikaitkan dengan aktivitas negatif.

"Kalau sifatnya mengganggu lingkungan, saya sebagai bupati tidak memperbolehkan. Karena sound horeg itu kadang suaranya tidak karu-karuan. Kebanyakan para pemuda melakukan hal-hal negatif, seperti ngoplo dan mabuk," tegas Subandi, Senin (3/8).

Ia mengatakan, Pemkab



Kalau sifatnya mengganggu lingkungan, saya sebagai bupati tidak memperbolehkan. Karena sound horeg itu kadang suaranya tidak karu-karuan. Kebanyakan para pemuda melakukan hal-hal negatif, seperti ngoplo dan mabuk,"

Subandi
Bupati Sidoarjo

Sidoarjo akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menentukan langkah penertiban terhadap kegiatan sound horeg. Apabila dalam pelaksanaannya terbukti mengganggu lingkungan maupun ketertiban umum, pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan.

"Kalau memang terbukti mengganggu lingkungan, tentu akan kami tertibkan. Kami akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan," ujarnya. (dik/vga)



Sidoarjo Berantas Miras Bupati Subandi Terjun Razia Miras Dua Malam Berturut-turut

Sidoarjo, Pojok Kiri-

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengobarkan perang terhadap peredaran minuman keras (miras) ilegal. Razia serentak yang digelar bernama Forkopimda dan Forkopimka di 18 kecamatan, Sabtu (1/8) malam, menumbuhkan hasil besar. Sebanyak 1.696 botol miras disita dari berbagai lokasi. Operasi gabungan itu menyasar toko, warung, hingga tempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dan penjualan miras. Temuan terbesar berasal dari kawasan Graha Kota. Petugas mengamankan 851 botol miras dari sebuah toko yang berdekatan dengan toko vape. Sementara 845 botol lainnya disita dari kecamatan lainnya.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, razia dilakukan serentak dengan melibatkan seluruh camat sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah menekan peredaran miras yang dinilai menjadi pemacu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Sidoarjo perang melawan miras. Alhamdulillah, malam ini teman-teman camat bergerak serentak dan berhasil menemukan peredaran miras di sejumlah wilayah," ujarnya.

Menurut Subandi, temuan gudang berdekatan toko vape menunjukkan pelaku terus mencari cara mengelabui petugas. Dari depan, bangunan itu tampak sepi-

erti toko rokok elektrik. Namun, bagian belakangnya dipenuhi ratusan botol minuman keras. "Kalau dilihat dari depan memang toko vape. Setelah dicek ke belakang, ternyata menjadi gudang miras. Jumlahnya sekitar 851 botol," ungkapnya.

Petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha. Salah satu petinggi izin distributor diduga menjual miras secara curan kepada masyarakat melalui aplikasi daring. Praktik tersebut melanggar ketentuan yang berlaku. "Jangan coba-coba mengelabui petugas. Mengaku distributor, tetapi menjual curan lewat aplikasi online. Praktik seperti ini akan kami tindak tegas," tegasnya.

Ia memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala untuk mempersempit ruang gerak peredaran miras di Sidoarjo. Menurutnya, ketertiban camat dalam operasi kali ini membuat pengawasan di setiap wilayah berjalan lebih efektif.

Bupati Subandi mengajak masyarakat ikut mengawasi lingkungan sekitar. Warga diminta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya penjualan maupun penyimpanan miras ilegal.

"Kalau ada informasi mengenai peredaran miras, segera laporkan kepada pemerintah daerah atau camat setempat. Setiap laporan akan langsung kami tindak lanjut," pungkasan Subandi. (Khol/Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



KENA RAZIA: Salah satu toko miras Sobat Minuman yang disidak Pemkab Sabtu (1/8) malam. DPRD mendorong pembatasan gerai lewat perda.

DPRD Gagas Perda Khusus Atur Zonasi Toko Miras

SIDOARJO - Polemik mengenai gerai minuman keras (miras) di Kota Delta mendapat perhatian DPRD. Regulasi yang selama ini menjadi dasar pengendalian peredaran miras dinilai masih memiliki kelemahan sehingga perlu dievaluasi. Bahkan, aturan tersebut berpeluang dipisahkan menjadi peraturan daerah (perda) khusus.

Saat ini, pengendalian peredaran miras di Sidoarjo masih mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantib). Aturan itu juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, ada opsi memisahkan pengaturan peredaran miras dari Perda Trantib agar pembahasannya lebih komprehensif dan fokus. "Kami matangkan terlebih dahulu apakah memungkinkan dipisah menjadi perda tersendiri atau memang cukup dilakukan revisi," katanya kemarin (3/8).

Menurut Nasih, perda yang berlaku saat ini lebih banyak mengatur larangan bagi penjual maupun pelaku usaha. Sementara itu, pengaturan mengenai perlindungan masyarakat dari dampak peredaran dan konsumsi miras dinilai masih belum memadai. Salah satu ketentuan yang dinilai perlu diperjelas ada-

lah aturan zonasi gerai miras. Perda memang melarang penjualan minuman beralkohol di sekitar sekolah dan tempat ibadah. Namun, hingga kini belum ada ketentuan yang mengatur batas atau radius yang dimaksud dengan lokasi berdekatan. Akibatnya, aturan tersebut masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. (ful/hen)

Jawa Pos



Sidoarjo Berantas Miras Bupati Subandi Terjun Razia Miras Dua Malam Berturut-turut

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengobarkan perang terhadap peredaran minuman keras (miras) ilegal. Razia serentak yang digelar bersama Forkopimda dan Forkopimka di 18 kecamatan, Sabtu (1/8) malam, membuahkan hasil besar. Sebanyak 1.696 botol miras disita dari berbagai lokasi.

Operasi gabungan itu menasar toko, warung, hingga tempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dan penjualan miras. Temuan terbesar berasal dari kawasan Graha Kota. Petugas mengamankan 851 botol miras dari sebuah ruko yang berkedok toko vape. Sementara 845 botol lainnya disita dari kecamatan lainnya.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, razia dilakukan serentak dengan melibatkan seluruh camat sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah menekan peredaran miras yang dinilai menjadi pemicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Sidoarjo perang melawan miras. Alhamdulillah, malam ini teman-teman camat bergerak serentak dan berhasil menemukan peredaran miras di sejumlah wilayah," ujarnya.

Menurut Subandi, temuan gudang berkedok toko vape menunjukkan pelaku terus mencari cara mengelabui petugas. Dari depan, bangunan itu tampak se-

perti toko rokok elektrik. Namun, bagian belakangnya dipenuhi ratusan botol minuman keras.

"Kalau dilihat dari depan memang toko vape. Setelah dicek ke belakang, ternyata menjadi gudang miras. Jumlahnya sekitar 851 botol," ungkapnya.

Petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha. Salah satu pemegang izin distributor diduga menjual miras secara eceran kepada masyarakat melalui aplikasi daring. Praktik tersebut melanggar ketentuan yang berlaku. "Jangan coba-coba mengelabui petugas. Mengaku distributor, tetapi menjual eceran lewat aplikasi online. Praktik seperti ini akan kami tindak tegas," tegasnya.

Ia memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala untuk mempersempit ruang gerak peredaran miras di Sidoarjo. Menurutnya, keterlibatan camat dalam operasi kali ini membuat pengawasan di setiap wilayah berjalan lebih efektif.

Bupati Subandi mengajak masyarakat ikut mengawasi lingkungan sekitar. Warga diminta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya penjualan maupun penyimpanan miras ilegal.

"Kalau ada informasi mengenai peredaran miras, segera laporkan kepada pemerintah daerah atau camat setempat. Setiap laporan akan langsung kami tindak lanjuti," pungkas Subandi. (Khol/Dy)

Bupati Akan Tertibkan Sound Horeg yang Ganggu Warga

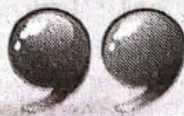
■ Di Perayaan HUT RI

KOTA-Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Sidoarjo Subandi mengingatkan masyarakat agar perayaan 17 Agustus tidak dijadikan ajang yang mengganggu ketertiban umum. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo siap menertibkan kegiatan sound horeg apabila terbukti meresahkan warga, terlebih jika disertai penyalahgunaan minuman keras.

Menurut Subandi, hiburan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan sah-sah saja digelar, namun harus tetap mengedepankan kenyamanan dan keamanan masyarakat. Ia menilai penggunaan sound horeg dengan volume berlebihan tidak hanya menimbulkan kebisingan, tetapi juga kerap dikaitkan dengan aktivitas negatif.

"Kalau sifatnya mengganggu lingkungan, saya sebagai bupati tidak memperbolehkan. Karena sound horeg itu kadang suaranya tidak karu-karuan. Kebanyakan para pemuda melakukan hal-hal negatif, seperti ngoplo dan mabuk," tegas Subandi, Senin (3/8).

Ia mengatakan, Pemkab



Kalau sifatnya mengganggu lingkungan, saya sebagai bupati tidak memperbolehkan. Karena sound horeg itu kadang suaranya tidak karu-karuan. Kebanyakan para pemuda melakukan hal-hal negatif, seperti ngoplo dan mabuk,"

Subandi
Bupati Sidoarjo

Sidoarjo akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menentukan langkah penertiban terhadap kegiatan sound horeg. Apabila dalam pelaksanaannya terbukti mengganggu lingkungan maupun ketertiban umum, pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan.

"Kalau memang terbukti mengganggu lingkungan, tentu akan kami tertibkan. Kami akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan," ujarnya. (dik/vga)



Sentuh Warga Prambon, Bupati Tinjau Warga Miskin di Pinggiran

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus menancapkan komitmennya dalam mempercepat penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warga kurang mampu. Lewat agenda rutin akhir pekan, Bupati Sidoarjo Subandi meninjau langsung program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekaligus menyerahkan bantuan alat kesehatan di Kecamatan Prambon, Sabtu (01/08/).

Dalam peninjauan lapangan ini, Subandi didampingi Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Martha Wara Kusuma, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno serta jajaran pengurus Baznas Sidoarjo.

Titik pertama yang disasar adalah rumah Sariatun (62), seorang buruh tani warga Desa Kedungsugo. Kondisi hunian Sariatun sangat memprihatinkan dengan atap lapuk yang rawan roboh. Selain membenahi atap, Pemkab Sidoarjo juga memprioritaskan pembangunan fasilitas sanitasi yang layak bagi keluarganya.

Masih di desa yang sama, intervensi bedah rumah juga menyasar hunian milik Ponijah. Perbaikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari struktur atap, pemasangan keramik lantai hingga fasilitas kamar mandi.

“Mudah-mudahan program bedah rumah ini, membawa manfaat nyata. Atap direnovasi, lantai dipasang keramik dan sanitasi dibenahi agar rumah lebih layak dan sehat untuk ditinggali,” ujar Subandi di sela-sela peninjauan. (Nang)

WABUP MIMIK AJAK WARGA TAAT PAJAK, HASILNYA KEMBALI UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengajak masyarakat semakin sadar dan patuh memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas publik yang dinikmati bersama.

Ajakan tersebut disampaikan saat memberangkatkan ribuan peserta jalan sehat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sidoarjo di Monumen Jayandaru, Alun-alun Sidoarjo, Minggu (2/8/2026).

Mimik mengapresiasi langkah IKPI yang mampu memadukan kegiatan olahraga, pelayanan kesehatan, edukasi perpajakan, dan aksi sosial dalam satu rangkaian kegiatan.

Ia menilai sinergi seperti ini penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa pajak memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan daerah.

"Selamat Hari Ulang Tahun ke-61 IKPI. Semoga semakin maju, profesional, dan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran pajak ditengah masyarakat," katanya.

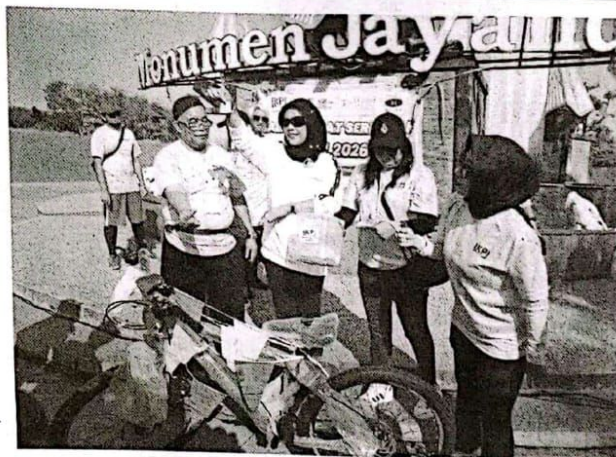
Mimik menegaskan masyarakat tidak seharusnya memandang pajak hanya sebagai angka. Ia menyampaikan bahwa semakin baik kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, semakin lancar pula pembangunan daerah yang dapat dinikmati bersama.



"Semakin tinggi kepatuhan masyarakat membayar pajak secara tepat waktu, semakin besar pula kemampuan pemerintah menghadirkan pembangunan yang berkualitas, serta manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Sementara, Ketua IKPI Cabang Sidoarjo, Budi, mengatakan peringatan HUT ke-61 IKPI tahun ini dikemas tidak hanya sebagai ajang silaturahmi anggota, tetapi juga menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan sehat menjadi agenda utama sekaligus upaya mencatatkan Rekord Museum Rekord Dunia Indonesia (MURI), dengan harapan dapat mendorong budaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpajakan.

"Melalui peringatan ini kami ingin menunjukkan bahwa IKPI tidak hanya berperan sebagai organisasi



profesi konsultan pajak, tetapi juga hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial, edukasi perpajakan, dan kolaborasi bersama pemerintah untuk memberikan manfaat yang lebih luas," ujarnya.

Selain jalan sehat, IKPI Cabang Sidoarjo juga menyediakan

berbagai layanan gratis bagi masyarakat, seperti donor darah, konsultasi perpajakan, pemeriksaan kesehatan, serta program tebus murah. Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan pembagian doorprize, termasuk hadiah utama sepeda gunung. (Khol/Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Sidoarjo Ajak Warga Taat Pajak

Sidoarjo, Memorandum

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengajak masyarakat semakin sadar dan patuh memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas publik.

Ajakan itu disampaikan saat memberangkatkan ribuan peserta jalan sehat dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sidoarjo di Monumen Jayandaru, Alun-alun Sidoarjo, Minggu (2/6). Ia mengapresiasi langkah IKPI yang mampu memadukan kegiatan olahraga, pelayanan kesehatan, edukasi perpajakan, dan aksi sosial dalam satu rangkaian kegiatan. Ia menilai sinergi seperti ini penting untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekali-

gus membangun kesadaran bahwa pajak memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan daerah. "Selamat Hari Ulang Tahun ke-61 IKPI. Semoga semakin maju, profesional, dan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran pajak ditengah masyarakat," katanya. Ia menegaskan masyarakat tidak seharusnya memandang pajaknya sebagai ang- ka. Ia menyampaikan bahwa semakin baik kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, semakin lancar pula



Wabup Sidoarjo Mimik Idayana mengajak rakyat taat pajak.

pembangunan daerah yang dapat dinikmati bersama. "Semakin tinggi kepa- tuhan masyarakat mem- bayar pajak secara tepat waktu, semakin besar pula kemampuan pemerintah menghadirkan pembangun- an yang berkualitas, serta manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya. Ketua IKPI Cabang Si-

doarjo, Budi, mengatakan peringatan HUT ke-61 IKPI tahun ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi anggota, tetapi juga mengha- dikan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Jalan sehat menjadi agenda utama sekaligus upaya mencatatkan Rekor Museum Rekor Dunia In- donesia (MURI), dengan

harapan dapat mendorong budaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pen- tingnya perpajakan. "Melalui peringatan ini kami ingin menunjukkan bahwa IKPI tidak hanya ber- peran sebagai organisasi pro- fesi konsultan pajak, tetapi juga hadir di tengah masya- rakat melalui kegiatan sosial, edukasi perpajakan, dan kolaborasi bersama pem- erintah untuk memberikan manfaat yang lebih luas," ujarnya. Selain jalan sehat, IKPI Cabang Sidoarjo juga me- nyediakan berbagai layanan gratis bagi masyarakat, se- perti donor darah, konsultasi perpajakan, pemeriksaan ke- sehatan, serta program tebus murah. Kegiatan tersebut juga diernahkan dengan pembagian doorprize, ter- masuk hadiah utama sepeda gunung.(sud/jok/fdn)



Razia di 18 Kecamatan, 1.696 Botol Miras Disita

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengobarkan perang terhadap peredaran minuman keras (miras) ilegal. Razia serentak yang digelar bersama Forkopimda dan Forkopimka di 18 kecamatan, Sabtu 1 Agustus 2026 malam, membuahkan hasil besar.

Sebanyak 1.696 botol miras disita dari berbagai lokasi. Operasi gabungan itu menasar toko, warung, hingga tempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dan penjualan miras.

Temuan terbesar berasal dari kawasan Graha Kota. Petugas mengamankan 851 botol miras dari sebuah ruko yang berkedok toko vape. Sementara 845 botol lainnya disita dari kecamatan lainnya.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, razia dilakukan serentak dengan melibatkan seluruh camat sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah menekan peredaran miras yang dinilai menjadi pemicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Sidoarjo perang melawan miras. Alhamdulillah, malam ini teman-teman camat bergerak serentak dan berhasil menemukan peredaran miras di sejumlah wilayah," ujarnya.

Menurut Subandi, temuan gudang berkedok toko vape menunjukkan pelaku terus mencari cara mengelabui petugas. Dari depan, bangunan itu tampak seperti toko rokok elektrik. Namun, bagian belakangnya dipenuhi ratusan botol minuman keras. "Kalau dilihat dari depan memang toko vape. Setelah dicek ke belakang, ternyata menjadi gudang miras. Jumlahnya sekitar 851 botol," ungkapnya. (md/rus)



Razia di 18 kecamatan berhasil menyita
1.696 botol miras.

CS

Jembatan Penghubung Perum Surya Brezze Dengan Pemukiman Warga, Bentuk Partisipasi Pemerintah Dengan Badan Usaha

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Hal Ini pemerintah Desa Keboananom Kecamatan Gedangan Dengan PT. Jaya Land membangun Jembatan Penghubung menuju Perumahan Surya Breeze merupakan partisipasi swasta dalam proyek untuk penyediaan infrastruktur publik. Dalam skema ini, pihak swasta PT. Jaya Land turut menyediakan seluruh pendanaan, keahlian teknis, serta menanggung sebagian risiko proyek.

Di bangunya jembatan penghubung yang dilakukan oleh PT. Jaya Land selain bentuk partisipasi swasta dalam proyek untuk penyediaan infrastruktur publik, Manfaat lain yang di rasakan oleh masyarakat sekitar ialah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi

masyarakat dengan Di dasari untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Dalam Keterangannya sutyono selaku kepala Desa menjelaskan” pembangun jembatan Penghubung menuju perumahan Surya Breeze merupakan program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pengelolaan KPBU mulai Tahap

Penyiapan sampai pada Tahap Transaksi KPBU” jelasnya Senin (3/8). “Sesuai dengan peraturan yang berlaku

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha yang terealisasi di Desa Keboananom ialah infrastuktur jembatan, tentunya sebelum di lakukan pembangunan jembatan, kita bersama pemerintah daerah serta Badan Usaha Dalam Hal ini PT. Jaya Land melakukan Kon-



sultasi Publik dalam pembahasan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU” Tambahnya.

“Kami selaku perwakilan masyarakat juga selaku pemangku kepentingan tentunya berterima kasih kepada Pemerintah Daerah

dan Juga PT. Jaya land, dengan adanya Penyediaan Infrastruktur guna untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dansosial masyarakat dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Nang)

CS Beras dengan Garam

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



SATPOL PP

PENERTIBAN: Satu ekskavator dioperasikan untuk membongkar bangli yang diduga dipakai untuk prostitusi di Krengseng, Krian.

Kerahkan Alat Berat, Bongkar 21 Warung Remang-Remang di Krian

SIDOARJO - Satpol PP Sidoarjo menertibkan 21 warung remang-remang di kawasan Krengseng, Krian, kemarin (3/8). Bangunan liar (bangli) yang diduga dipakai untuk prostitusi dibongkar dengan alat berat dan melibatkan puluhan petugas.

Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setiyawan mengatakan, sebelum pembongkaran, Pemkab telah memberi peringatan hingga tiga kali. Namun, sebagian pemilik tak membersihkan bangunannya. "Kami musnahkan agar tak dipakai kembali," kata Yany.

Dia menjelaskan, penertiban serupa juga dilakukan di kawasan pinggir rel Randupitu, Kecamatan Candi. Selain dua lokasi tersebut, Satpol PP masih memetakan sejumlah titik lain yang diduga menjadi tempat praktik penyakit masyarakat. "Kami harap pemangku wilayah melaporkan jika ada lokasi yang masih dijadikan tempat penyakit masyarakat," paparnya. (eza/hen)

Jawa Pos

12 Ormas Terima Dana Hibah Rp 150 Miliar

Turun 30 Persen Akibat Efisiensi

SIDOARJO - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Sidoarjo tetap menggulirkan program hibah untuk organisasi kemasyarakatan (ormas). Bupati Subandi beralasan, hibah diberikan sebagai bentuk dukungan pada kegiatan kemasyarakatan.

Ada 12 ormas yang mendapat anggaran hibah tahun ini. Nilainya Rp 150 miliar. PCNU Sidoarjo menjadi penerima terbesar dengan alokasi Rp 18,9 miliar. Sementara itu, Pimpinan Daerah Muham-



KONSOLIDASI: Bupati Subandi (kiri) berdiskusi dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo Dzo'ul Milal di Kantor Muhammadiyah Sidoarjo kemarin (3/8).

madiyah (PDM) Sidoarjo menerima hibah sekitar Rp 7,9 miliar. Sisa anggaran disalurkan kepada 10 organisasi kemasyarakatan lainnya yang tercantum sebagai penerima hibah dalam APBD 2026.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, kebijakan efisiensi membuat pemerintah

belum bisa mengakomodasi seluruh usulan hibah yang diajukan masing-masing organisasi. Meski demikian, alokasi hibah tetap dipertahankan sebagai bentuk sinergi pemerintah dengan ormas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Mudah-mudahan

HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- Ada 12 ormas yang menerima
- Nilainya Rp 150 miliar
- PCNU jadi penerima terbanyak yakni Rp 18,9 miliar
- Rata-rata hibah yang diterima turun 30 persen

Sumber: Pemkab Sidoarjo

bisa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Berharap Kondisi Fiskal Daerah Membaik

Subandi menjelaskan, nilai hibah yang diterima

setiap organisasi mengalami penyesuaian. Secara rata-rata besarnya berkurang sekitar 30 persen dibandingkan rencana awal. Pemangkasan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Meski demikian, ia berharap kondisi fiskal daerah kembali membaik dalam beberapa tahun ke depan sehingga alokasi hibah dapat dikembalikan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan. "Kalau tidak ada efisiensi, bisa kami penuh sesuai rencana sebelumnya," katanya. **(ful/hen)**

Jawa Pos

21 Lapak Eks Lokalisasi Dibongkar dan Dibakar

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Penataan kawasan eks Lokalisasi Krengseng Krian memasuki babak baru. Senin (3/8), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurunkan ratusan personel gabungan untuk membongkar bangunan liar yang masih berdiri di kawasan tersebut.

Sebanyak 21 lapak warung diratakan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan sekaligus menegakkan ketertiban umum. Sejak pagi, sekitar pukul 09.35 WIB, sebanyak 125 personel gabungan berkumpul di lokasi. Mereka terdiri atas anggota Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Polsek Krian, Koramil Krian, Kecamatan Krian, Dinas Perhubungan, Dinas PUBMSDA, hingga personel PT KAI Daop 8 Surabaya.

Operasi dipimpin langsung Kasatpol PP Kabupaten Sidoarjo Drs Yany Setyawan. Sebelum pembongkaran dimulai, seluruh personel mengikuti apel yang dipimpin Plt Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) Satpol PP Sidoarjo, R Novianto.

Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penertiban tersebut bukan



Lapak di eks Lokalisasi Krengseng Krian dimusnahkan usai pembongkaran.

tindakan mendadak, melainkan merupakan tahapan akhir dari proses yang telah berlangsung sebelumnya. Menurutnya, pemerintah telah memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan, melakukan sosialisasi, hingga memberi kesempatan agar bangunan dibongkar secara mandiri.

Karena masih terdapat bangunan yang tersisa, pembongkaran akhirnya dilakukan oleh tim gabungan. "Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menata kawasan agar kembali sesuai dengan peruntukannya," ujar Novianto.

Ia menambahkan, penataan kawasan Krengseng tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan. Pemerintah juga ingin

menghilangkan berbagai aktivitas yang selama ini dianggap menjadi sumber penyakit masyarakat.

Menurutnya, penertiban tersebut diharapkan mampu mendukung langkah pemerintah dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS serta berbagai persoalan sosial lain yang selama ini melekat dengan kawasan eks lokalisasi tersebut.

Usai apel, petugas langsung bergerak menuju titik-titik bangunan yang masih berdiri. Alat pembongkaran mulai bekerja merobohkan sisa bangunan yang sebelumnya telah dibongkar sebagian oleh pemilik maupun penghuni. Proses pembongkaran berlangsung tanpa perlawanan. Personel gabungan mengamankan lokasi selama proses berlangsung sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib dan lancar.

Sekitar pukul 11.15 WIB, seluruh bangunan yang menjadi sasaran berhasil diratakan. Setelah dipastikan tidak ada lagi bangunan yang berdiri, sisa tenda dan material yang mudah terbakar dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak kembali dimanfaatkan. (md/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Eks Lokalisasi Krengseng Rata dengan Tanah

SIDOARJO, SURYA – Kawasan eks lokalisasi Krengseng di Kecamatan Krian benar-benar dibersihkan. Sebanyak 21 lapak liar yang masih berdiri diratakan dalam operasi gabungan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bersama aparat terkait, Senin (3/8).

Operasi ini menjadi babak akhir penertiban kawasan yang selama bertahun-tahun identik dengan prostitusi dan penyakit masyarakat. Pemerintah menegaskan pembongkaran bukan sekadar merobohkan bangunan, melainkan mengembalikan fungsi kawasan sekaligus memperkuat penegakan ketertiban umum.

Sedikitnya 21 lapak diratakan dengan tanah. Bangunan-bangunan liar tersebut

dirobohkan, dibersihkan, bahkan sebagian dibakar agar kawasan benar-benar steril.

Sebanyak 125 personel gabungan diterjunkan sejak pagi. Mereka terdiri atas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Polsek Krian, Koramil Krian, Kecamatan Krian, Dinas Perhubungan, Dinas PUBMSDA, hingga personel PT KAI Daop 8 Surabaya.

Plt Kabid Ketertiban Masyarakat (Tibumtrans) Satpol PP Sidoarjo, R Novianto, mengatakan penertiban bukan dilakukan secara mendadak. Pemerintah sebelumnya telah mengirimkan surat pemitahuan kepada pemilik bangunan, melakukan sosialisasi, hingga memberi kesempatan untuk mem-

bongkar bangunan secara mandiri.

"Karena masih terdapat bangunan yang tersisa, pembongkaran akhirnya dilakukan oleh tim gabungan. Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, serta menata kawasan agar kembali sesuai dengan peruntukannya," ujar Novianto.

Penataan kawasan Krengseng tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan. Pemerintah juga ingin menghilangkan berbagai aktivitas yang selama ini dianggap menjadi sumber penyakit masyarakat.

Penertiban tersebut diharapkan mendukung langkah

pemerintah dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS serta berbagai persoalan sosial lain yang selama ini melekat dengan kawasan eks lokalisasi tersebut.

Setelah pembongkaran, kawasan eks Lokalisasi Krengseng akan memasuki tahap penataan lanjutan sesuai rencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penataan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

"Penegakan aturan juga akan terus dilaksanakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa izin maupun yang tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukannya," tandas Novi.

Pembongkaran di Krengseng menjadi salah satu lang-



EKSEKUSI – Petugas Satpol PP Pemkab Sidoarjo saat membersihkan dan membakar lapak-lapak bekas lokalisasi Krengseng yang telah ditertibkan, Senin (3/8).

kah nyata pemerintah daerah dalam menata kawasan yang selama bertahun-tahun identik dengan aktivitas prostitusi dan berbagai penyakit masyarakat. (ufl)

Lokalisasi Krengseng Krian Dibongkar

Satpol PP Ratakan
21 Warung dan 12 Bilik

KRIAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik prostitusi. Setelah menertibkan lokalisasi Randu Pitu di belakang Pasar Larangan, Kecamatan Candi, kini giliran lokalisasi Krengseng di Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, yang dibongkar hingga rata dengan tanah, Senin (3/8).

Sebanyak 21 warung remang-remang dan 12 bilik prostitusi dibongkar dalam operasi gabungan yang melibatkan ratusan personel Satpol PP Sidoarjo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (For-kopinka) Krian, Polsek Krian, Koramil Krian, Dinas PU Bina Marga, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator, petugas merobohkan seluruh bangunan semi permanen yang berdiri di kawasan tersebut. Barang-barang yang masih tertinggal di dalam warung dan bilik juga dimusnahkan. Kini, kawasan yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai lokalisasi itu telah bersih dan rata dengan tanah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketertir-



TEGAS: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo membongkar bangunan di kawasan lokalisasi Krengseng, Kecamatan Krian, menggunakan alat berat, Senin (3/8).

ban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtran-mas) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Raden Novianto Koesno Adi Putro, mengatakan pembongkaran dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi dipenuhi.

"Lokalisasi ini sudah kami berikan surat pemberitahuan pembongkaran mandiri, kemudian Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3. Setelah seluruh prosedur dijalankan, hari ini kami melaksanakan pembongkaran," ujarnya.

Menurut Novianto, total bangunan yang dibongkar

terdiri atas 21 warung remang-remang dan 12 bilik prostitusi. "Ada sekitar 21 warung yang kami bongkar. Untuk bilik, di sisi utara terdapat sekitar empat bilik, sedangkan di sisi selatan sekitar tujuh hingga delapan bilik. Totalnya ada 12 bilik," jelasnya.

Ia menuturkan, penertiban ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak yang sebelumnya dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo di kawasan Krengseng yang berada di sekitar wilayah Kemas, Tambak Kemerakan, dan Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian.

Menurutnya, langkah te-

gas tersebut dilakukan sebagai upaya menekan praktik prostitusi yang dinilai berpotensi meningkatkan penyebaran HIV/AIDS serta memicu peredaran minuman keras (miras) ilegal.

"Tentunya ini merupakan langkah pencegahan terhadap penyebaran HIV/AIDS yang angkanya cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, kami juga ingin menekan pelanggaran terkait peredaran minuman beralkohol atau minuman keras ilegal," katanya.

Novianto menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan agar kawasan

Ke Halaman 10



Lokalisasi Krengseng...

tersebut tidak kembali dimanfaatkan sebagai lokasi prostitusi. "Setelah pembongkaran, kami akan memperkuat koordinasi dengan jajaran kewilayahan. Patroli cipta kondisi juga akan terus dilakukan, termasuk pengawasan secara terpadu agar tidak muncul kembali aktivitas serupa," tegasnya.

Terkait status lahan, Novianto menjelaskan kawasan tersebut berada di atas beberapa kepemilikan, yakni aset

PT Kereta Api Indonesia (KAI), Tanah Kas Desa (TKD), serta sebagian merupakan tanah gogol milik warga.

Selain itu, Satpol PP juga masih melakukan pendataan dan pemetaan terhadap sejumlah lokasi lain yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi.

"Kami terus melakukan pendataan dan pemetaan. Selama ini jajaran deteksi dini dan intelijen kami rutin melakukan penyelidikan di lapangan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi melanggar aturan,"

ungkapnya.

Sementara itu, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya, Anok Wiranto, memastikan pihaknya akan terus bersinergi dengan Satpol PP dan pemerintah daerah untuk menjaga kawasan tersebut tetap steril dari aktivitas prostitusi.

"Kami akan berkolaborasi dengan Satpol PP Sidoarjo untuk melakukan pemantauan. Patroli rutin akan kami lakukan, termasuk pada malam hari,

agar tidak ada lagi aktivitas di lokasi ini," ujarnya.

Anok menambahkan, pengawasan akan melibatkan pemerintah desa dan aparat kewilayahan karena sebagian lahan merupakan aset PT KAI, sementara sebagian lainnya merupakan Tanah Kas Desa. "Pengawasan akan dilakukan bersama pemerintah desa dan unsur kewilayahan. Tidak mungkin hanya PT KAI yang melakukan pengamanan sendiri," katanya.

Lokalisasi Krengseng menjadi lokasi

kedua yang ditertibkan Satpol PP Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga telah membongkar lokalisasi Randu Pitu di belakang Pasar Larangan, Kecamatan Candi, pada Jumat (31/7).

Pemkab Sidoarjo memastikan penertiban akan terus berlanjut setelah proses pendataan dan pemetaan terhadap titik-titik lain yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi di berbagai wilayah Kabupaten Sidoarjo. (dik/vga)





POLEK KRIAN

TUTUP SEMENTARA: Pengendara yang akan melintasi Jalan Embong Kali diimbau mencari jalur alternatif karena jalan dibeton.

Embong Kali Dibeton, Jalur Krian-Wonoayu Dialihkan 5 Bulan

SIDOARJO - Pengendara yang biasa melintasi Jalan Embong Kali, Desa Kemasan, Kecamatan Krian, harus mencari jalur alternatif mulai kemarin (3/8). Ruas jalan tersebut ditutup untuk mendukung proyek betonisasi yang diperkirakan berlangsung hingga Desember.

Selama pekerjaan berlangsung, kendaraan roda empat maupun kendaraan besar tidak dapat melintasi ruas tersebut. Arus lalu lintas dari Krian menuju Wonoayu maupun sebaliknya dialihkan melalui sejumlah jalur alternatif.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DPUBMSDA Sidoarjo Joko Yasmintoro mengatakan, tahap awal pekerjaan diawali dengan pemangkasan sejumlah pohon di sekitar lokasi proyek. Dalam pekan ini, alat berat beserta material beton pracetak (precast) juga mulai didatangkan.

"Pekan ini lebih ke persiapan lokasi sebelum loading material," katanya. Joko menjelaskan, proyek betonisasi mulai perlintasan rel kereta api di sisi utara hingga Jalan Raya Tambak Kemerakan. Selain mengganti konstruksi jalan, proyek tersebut juga akan meningkatkan elevasi sekaligus memperlebar badan jalan sebagai lanjutan betonisasi ruas Kebonagung-Junwangi. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komunitas Emak-emak Dukung Sidoarjo Merdeka Tanpa Narkoba



Komunitas emak-emak di Kota Sidoarjo hadir dalam deklarasi Sidoarjo Merdeka tanpa Narkoba.

Sidoarjo, Bhirawa

Sebanyak 150 anggota komunitas emak-emak di Kabupaten Sidoarjo turut dalam "Deklarasi Sidoarjo Merdeka Tanpa Narkoba", yang digelar Badan Narkotika Nasional kabupaten (BNNK) Sidoarjo, Minggu pagi (2/8) akhir pekan lalu.

Kepala BNNK Sidoarjo, Kombes Pol. Gatot Soegeng Soesanto SH, mengatakan deklarasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkoba.

"Meski penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidoarjo masih dibawah Nasional, kita harus terus waspada, sebab modus modus baru penyalahgunaan Narkotika terus ada," komentarnya.

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana, yang hadir dalam deklarasi

tersebut mengajak para emak-emak di Kabupaten Sidoarjo untuk terus mendampingi anak-anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. "Keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba," komentarnya.

Penyalahgunaan Narkoba, ujar Mimik, dapat mengancam siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja, bahkan orang dewasa. Ancaman narkoba selain tidak mengenal usia, juga tidak mengenal status sosial, maupun latar belakang dan pendidikan.

Pemberantasannya tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, dengan sosialisasi dan edukasi. Sebagai seorang ibu, Mimik juga mengajak seluruh masyarakat Sidoarjo agar memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga. Masyarakat Sidoarjo diminta agar berani melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan Narkotika di sekitarnya. "Segera laporkan kepada BNNK Sidoarjo, agar pemakai bisa segera direhabilitasi," ujarnya.[kus.ca]

HARIAN
Bhirawa
Berita Rakyat Sidoarjo

Depresi karena Pekerjaan dan Keluarga, Tiga ASN Alami Gangguan Jiwa



Kami memberikan kesempatan sampai satu tahun. Kalau hasil evaluasi medis nanti menyatakan tidak ada perkembangan baru akan dipensiunkan."

Ahmad Misbahul Munir
Kepala BKD Sidoarjo

Pemkab Beri Kesempatan Setahun

SIDOARJO - Beban kerja yang berat plus situasi lingkungan kerja yang tak kondusif mendorong depresi berat. Tiga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo mengalami gangguan jiwa dan sudah lebih dari tiga bulan tidak masuk kerja. Ketiganya sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kabid Motivasi dan Disiplin BKD Sidoarjo M. Faiz Fanani menambahkan, tiga ASN yang mengalami gangguan jiwa itu perempuan. Mereka depresi karena masalah pekerjaan dan

keluarga. "Ada yang disebabkan pekerjaan, ada pula karena keluarga," kata Faiz.

Perawatan Intensif di RS

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir menambahkan, ketiga ASN tersebut hingga kini belum diberhentikan atau dipensiunkan dini. Pemerintah masih memberikan kesempatan selama satu tahun untuk melihat perkembangan kondisi kesehatan mereka.

"Statusnya masih cuti sakit. Jadi belum ada keputusan pensiun karena kami masih menunggu perkembangan kondisi kesehatannya," katanya kemarin (3/8). Menurut Misbah, selama tidak masuk kerja,

ketiga ASN tersebut menjalani perawatan di RSJ Radjiman Wediodiningrat, Malang. BKD bersama tim medis juga terus melakukan pemantauan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Tak Ada Perkembangan

Hingga saat ini, evaluasi medis telah dilakukan sebanyak tiga kali. Namun, hasilnya menunjukkan ketiganya masih mengalami gangguan jiwa sehingga belum dapat kembali menjalankan tugas sebagai ASN. "Mereka belum bisa kembali menjalankan tugas sebagai ASN," ujarnya.

BKD memberikan masa pemulihan selama satu tahun sebelum mengambil keputusan

terkait status kepegawaian mereka. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada perkembangan dan tim medis menyatakan mereka tidak lagi mampu menjalankan tugas sebagai ASN, proses pensiun dini akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami memberikan kesempatan sampai satu tahun. Kalau hasil evaluasi medis nanti menyatakan tidak ada perkembangan baru akan dipensiunkan," tegasnya. Misbah menambahkan, keputusan mengenai pensiun dini sepenuhnya mengacu pada rekomendasi tim medis. Selama proses evaluasi berlangsung, ketiga ASN tersebut tetap berstatus cuti sakit. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



78 Calon Paskibraka Jalani Karantina Selama 26 Hari

SEBANYAK 78 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Sidoarjo tahun 2026 yang akan tampil di upacara peringatan HUT Ke-merdekaan RI berlatih baris-berbaris dan kekompakan di Alun-alun Sidoarjo kemarin (3/8). Mereka menjalani karantina sejak 24 Juli hingga 18 Agustus mendatang. (*)

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Jawa Pos